



Piknik ke DIY Harus Tes Antigen

JOGJA—Pemerintah Pusat menginstruksikan pengunjung yang hendak ke DIY wajib menggunakan bukti hasil rapid tes antigen, bukan tes cepat antibodi seperti yang selama ini dipakai.

Lugas Subarkah, Ujang Hasanudin,
& Hafit Yudi Suprobo
redaksi@harianjogja.com

Hasil rapid antigen ini maksimal tiga hari sebelum kedatangan di DIY. Pada prinsipnya, hasil rapid antigen berlaku untuk semua pengunjung dengan segala moda transportasi. Untuk perjalanan darat nonkereta, pengecekan hasil rapid antigen dilakukan di tempat tujuan semisal hotel, destinasi wisata, atau keluarga penerima.

Sekda DIY, Kadarman Baskara Aji, mengatakan dalam rapat koordinasi menghadapi Natal dan Tahun Baru melalui *video conference* pada Kamis (17/12), Pemerintah Pusat meminta DIY memperketat protokol kesehatan dalam kurun 18 Desember hingga 8

▶ Pemerintah Pusat meminta DIY memperketat protokol kesehatan dalam kurun 18 Desember hingga 8 Januari 2021.

▶ Pemerintah Pusat minta jam operasional rumah makan, restoran, dan mal, dibatasi hingga pukul 20.00 WIB

Januari 2021.

Pengetatan penerapan prokes yang diminta oleh Pemerintah Pusat itu yakni melarang kegiatan berpotensi kumpulan orang seperti hajatan atau acara keagamaan, dan penerapan pembatasan sosial dengan membatasi operasional warung makan, restoran dan mal, hingga pukul 20.00 WIB.

"Acara keagamaan di gereja boleh, tapi protokol kesehatan harus dikuati, kalau kegiatan sosial ditunda dulu," katanya.

Meski demikian, ia mengatakan pengetatan protokol kesehatan ini masih bisa dimodifikasi di tingkat provinsi,

menyesuaikan kondisi di daerah masing-masing. "Belum menjadi kebijakan daerah. Nanti kami akan telaah untuk bisa bersama kabupaten-kota, kondisi DIY seperti apa," katanya.

Ia mencontohkan semisal tentang jam operasional, jika kondisi memungkinkan, jam operasional bukan dibatasi hingga pukul 20.00 WIB melainkan hingga pukul 21.00 WIB. Adapun untuk tes rapid antigen akan melihat ketersediaan fasilitas kesehatan yang bisa menguji.

"Kalau mencukupi ya kami terapkan, intinya ini kebijakan yang bagus karena punya akurasi lebih baik dibanding antibodi," ungkapnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan hotel harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan dari pengunjung. "Kalau ada yang positif akan saya tutup, hotel saya tutup juga," ujarnya saat ditemui wartawan, di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kamis.



Piknik ke...

Menurut Sultan, Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) DIY agar memastikan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan berjalan dengan baik.

SOP tersebut dibuat oleh asosiasi dengan mengacu pada Peraturan Gubernur No.48/2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan kegiatan Pelayaran Publik dan Perekonomian dalam Pencegahan Covid-19. "SOP mereka sendiri yang bikin. Tapi kalau ada yang positif ya tak close," ujarnya.

Di samping itu, Sultan berharap masyarakat juga memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. "Sudah delapan bulan mestinya masyarakat punya kesadaran, mestinya lebih baik," katanya.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menuturkan institusinya bersama Satpol PP kabupaten-kota, TNI dan Polri, akan mengarahkan semua kekuatan untuk operasi yustisi penegakan protokol kesehatan.

Pengawasan dimulai pada 24 Desember malam atau malam Natal. Pada hari itu, petugas akan patroli di tempat-tempat ibadah untuk mengecek penerapan protokol kesehatan. Kemudian pada 31 Desember, saat malam pergantian tahun, petugas akan beroperasi mengawasi destinasi wisata yang biasanya digunakan untuk perayaan malam tahun baru.

Objek wisata pantai menjadi lokasi yang kerap menimbulkan kerumunan karena masih menjadi tujuan favorit wisatawan saat musim libur. Untuk itu, khusus untuk pantai, Satpol PP DIY sudah menempatkan 328 personel untuk menjaga pada akhir pekan dan hari libur.

Petugas akan patroli dan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dengan memungut sampah.

Penambahan Kasus

Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 224 penambahan kasus positif pada Kamis, berdasarkan pemeriksaan pada 1.771 sampel dari 1.587 orang.

Kabupaten Sleman mendominasi penambahan dengan 105 kasus, disusul Bantul (51 kasus), Kota Jogja (33 kasus), Gunungkidul (21 kasus), dan Kulonprogo (14 kasus). Sebanyak 60 kasus dinyatakan sembuh dan dua kasus dilaporkan meninggal dunia.

Juru Bicara pemda DIY untuk

Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif (126 kasus), periksa mandiri (45 kasus), dan belum ada keterangan (53 kasus).

Kasus meninggal yakni Kasus 7.554, perempuan, 71, warga Sleman, dan Kasus 8.348, perempuan, 86, warga Bantul. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (16 kasus), Bantul (30 kasus), Kulonprogo (10 kasus), dan Sleman (4 kasus).

Dengan penambahan ini, total kasus positif Covid-19 di DIY menjadi sebanyak 8.860 kasus, dengan rincian 2.778 kasus aktif, 5.905 kasus sembuh, dan 177 kasus meninggal. Sementara penggunaan *bed* di rumah sakit rujukan untuk kritikal sebanyak 42 *bed*, sisa 22 *bed*; dan nonkritikal digunakan 453 *bed*, sisa 113 *bed*.

Patuh Pedoman

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) meminta pemerintah kabupaten dan kota di DIY dan Jawa Tengah untuk patuh terhadap pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 revisi V yang dikeluarkan Menteri Kesehatan RI.

Dalam pedoman tersebut kontak erat yang harus dites *suwab* adalah yang bergejala, sementara yang tidak bergejala cukup karantina 14 hari dan tidak perlu *suwab*, kecuali tenaga kesehatan.

"Persoalannya sekarang adalah kabupaten dan kota tidak patuh pedoman revisi lima (pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19)," kata Kepala BBTKLPP Bantul, Irene, Kamis.

Irene mengatakan dalam pedoman revisi V sudah dijelaskan kontak erat bergejala yang wajib dites *suwab*, sehingga tidak semua kontak erat dites *suwab*. Jika semua kontak erat dites *suwab*, kata dia, akibatnya spesimen akan menumpuk. "Kalau sehari sampel masuk 2.000-an sementara kapasitas kami 1.000-an maka otomatis terundur (pemeriksaan)," ucap Irene.

Menurut dia sejauh ini BBTKLPP masih mampu memeriksa 1.000 sampel per hari sehingga tidak perlu ada penambahan alat atau sumber daya pemeriksaan sampel. Sampel yang masuk ke jawabannya bukan hanya dari wilayah DIY namun beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Yang penting, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota saat ini patuh terhadap pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 hasil revisi V. Disinggung

soal pengadaan mobil PCR yang sudah dilakukan di Bantul, Irene menyatakan kapasitas mobil PCR tidak seberapa dibanding jumlah sampel yang diperiksa.

Dia mencontohkan dari Bantul saja pernah masuk 800-an sampel dalam sehari, padahal sudah memiliki mobil tes PCR. Namun demikian Irene tidak mempersoalkan jika kabupaten dan kota ingin mengadakan uji sampel *suwab* mandiri.

"Silakan mereka mengadakan tapi kapasitasnya enggak banyak. Bantul saja sehari masuk ke kami 800 sampel, lebih banyak ke BBTKLPP (daripada ke mobil PCR)," ucap Irene.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso, mengaku sudah mendapat arahan dari Pemerintah Pusat terkait revisi V pedoman pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

"Kemarin Dinas Kesehatan DIY akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Kami kabupaten wajib mematuhi," kata Sri Wahyu.

Adapun, RSUP Prof. Dr. Sardjito mampu memeriksa spesimen 300 sampel sehari. Kabag Hukum dan Humas RSUP Prof. Dr. Sardjito, Banu Hermawan, mengatakan hasil dari satu sampel sendiri dapat diketahui kurang dari 24 jam. "Misalnya sampel masuk jam 08.00 pagi, hasilnya diketahui sekitar pukul 18.00 petang," ujar Banu.

Walaupun, satu sampel yang diperiksa juga tidak luput dari hambatan. Ada sampel yang tidak bisa segera diketahui hasilnya. "Jadi harus dikonfirmasi ulang. Nah, kendala cek laboratorium di situ. Jadi, tidak serta merta dimasukkan ke sana (laboratorium Covid-19) terus langsung bisa keluar hasilnya. Tidak seperti itu, ada sampel walaupun itu jumlahnya sedikit harus dikroscek terlebih dahulu," ujarnya.

Proporsi sampel yang diperiksa RSUP Prof. Dr. Sardjito sekitar 70 sampel berasal dari internal Sardjito, ditambah sekitar 40 sampel dari bangsal khusus pasien Covid-19. "Jadi paling tidak separuh sampel itu dari luar, separuh sampel lainnya dari dalam," ujarnya.

Adapun untuk layanan tes *suwab* mandiri, RSUP Prof. Dr. Sardjito menerima 50 tes sampai dengan 70 tes. Angka tersebut berdasarkan data sejak dua hari pekan terakhir ini.

"Rata-rata *suwab* mandiri oleh warga karena ada yang berusaha melakukan upaya *tracing* sendiri. Ada yang *suwab* mandiri karena untuk pergi dan syariahnya memang harus menyertakan hasil *suwab*," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005